|  |  |
| --- | --- |
| Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)  [*www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id*](http://www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id/) | |
| **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pajak Daerah**  **Kabupaten Kubu Raya** | |
| **Renny Wulandari, Margareta Febrianti**  Universitas Panca Bhakti, Universitas Panca Bhakti  [rennywulandari@upb.ac.id](mailto:rennywulandari@upb.ac.id) | |
| ARTIKEL INFO | ABSTRACT |
| *Article history:*  *Avaible online jurnal.akuntansi.upb.ac.id* | *Kubu Raya Regency sets a tax on swallow nests which is regulated in Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Swallow's Nests Tax. This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of swallow's nest tax revenue to local taxes and the factors that influence it. The data used are primary data (results of interviews, observations and questionnaires) and secondary data (target and realization data). The analysis in this study was carried out for the years 2012-2019, the analysis technique used a qualitative descriptive analysis method with the formula for the ratio of effectiveness and contribution as well as observation / interviews with regional tax officers at the Regional Asset Financial Management Agency. The effectiveness of swallow's nest tax revenue is still less effective with an average yield of 69.09% from 2012-2019, the contribution of swallow's nest tax revenue to local tax revenue is still very less than 2012-2019 with an average amount of 5.4 %. The factors identified that affect the effectiveness and contribution are administration, market price of swallow's nest, number of taxpayers, willingness and awareness to pay taxes, location of taxpayers and inadequate database.*  ***Keywords:*** *Regional Regulation, Local Tax, Swallow's Nest Tax, Effectiveness, Contribution, in the Regional Asset Financial Management Agency of Kubu Raya Regency.* |
|  | **ABSTRAK**  Kabupaten Kubu Raya menetapkan pajak atas sarang burung walet yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah serta faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan adalah data primer (hasil wawancara,observasi dan kuesioner ) dan sekunder (data target dan realisasi ). Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk tahun 2012-2019, teknik analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan rumus rasio efektivitas dan kontribusi serta observasi/wawancara dengan petugas bagian perpajakan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet masih kurang efektif dengan hasil rata-rata 69,09% dari tahun 2012-2019, kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah masih sangat kurang dari tahun 2012-2019 dengan jumlah rata-rata 5,4%. Faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektivitas dan kontribusi adalah administrasi, harga sarang burung walet dipasaran, jumlah wajib pajak, kemauan dan kesadaran untuk membayar pajak, lokasi wajib pajak dan database yang masih kurang memadai.  ***Kata Kunci*:** *Peraturan Daerah, Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet, Efektivitas, Kontribusi, Di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.* |

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Bangsa indonesia telah merencanakan suatu gerakan pembangunan yang didukung oleh aspek kehidupan bangsa secara menyeluruh, terarah, bertahap dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Hal terpenting dalam suatu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap suatu daerah, dipengaruhi oleh keadaan dan keseimbangan dari Pajak. Pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam upaya pengelolaan pembangunan. Besar kecilnya pajak akan menentukan seberapa besar anggaran suatu negara dalam pengelolaan pembangunan negara tersebut, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimana salah satu sumber penerimaan daerah terbesar dan yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimana pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah yaitu, salah satunya sumber yang memiliki potensi yang cukup tinggi dan yang paling sentral adalah pajak.

Pajak juga sebagai pokok utama pertumbuhan suatu daerah, pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diatur dalam suatu peraturan daerah (perda), dalam wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya ikut berkontribusi, dalam membiayai pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah serta pembangunan di daerah, karena pemerintah daerah di indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang masing-masing diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Pemberian kewenangan kepada pihak daerah, dan untuk memungut pajak serta retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah 1 (satunya) dengan kabupaten yang memiliki kekayaan alam yang melimpah disektor perkebunan, perkembangan serta hewani. Kabupaten Kubu Raya juga memiliki otonomi daerah tersendiri, salah satu contohnya adalah pajak, pajak yang dipungut oleh daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah, yang dimana didalamnya pajak yang dipungut oleh daerah adalah pajak sarang burung walet (SBW).

Kabupaten Kubu Raya menetapkan pajak sarang burung walet yang telah diatur dalam peraturan daerah No. 2 Tahun 2016 tentang pajak sarang burung walet, Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet, dengan ini merupakan sebagai salah satu objek pajak di Kabupaten Kubu Raya, pajak sarang burung walet dipilih karena peraturan daerah mengenai sarang burung walet baru diatur pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 baru dilakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya. Dengan perkembangan usaha sarang burung walet itu, awalnya cukup baik dan banyak ditemukan dikalangan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Pajak Sarang Burung Walet, juga ikut untuk berkontribusi dalam rangka mengefisiensikan pelaksanaan pembangunan daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya yang terkait dengan peraturan bupati Kabupaten Kubu Raya No.46 Tahun 2008 menjelaskan tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, salah satu dari tugasnya adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah dan membuat perkiraan atau asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah serta mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah:

**Tabel 1**

**Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet**

**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 sampai dengan 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Persentase %** | **Efektif/tidak efektif** |
| 2015 | 5.000.000,00 | 19.000.000,00 | 380.00% | Sangat Efektif |
| 2016 | 150.000.000,00 | 24.540.000,00 | 16.36% | Tidak Efektif |
| 2017 | 75.000.000,00 | 57.504.000,00 | 76.67% | Kurang Efektif |
| 2018 | 71.188.000,00 | 80.110.000,00 | 112.53% | Sangat Efektif |
| 2019 | 87.000.000,00 | 87.048.000,00 | 100,06% | Sangat Efektif |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2020

Dalam penelitian ini penulis menemukan ada beberapa indikasi yang di dapat, indikasi tersebut adalah penentuan target oleh pemerintah masih belum mempertimbangkan lokasi dan keadaan sarang burung walet, serta kurangnya pengawasan pada objek pajak sarang burung walet. Penyebab dari turunnya target Pajak Sarang Burung Walet di tahun 2016 dan 2017, dikarenakan kurangnya pengelolaan serta pengawasan objek pajak yang dilakukan oleh pengusaha dan pemerintah sehingga berdampak pada efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet. Maka pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan sosialisasi tentang pajak kepada para pengusaha sarang burung walet dan memperketat pengawasan pada objek pajak sarang burung walet. Kemudian, pemerintah kabupaten kubu raya menetapkan bahwa target tidak lagi mempertimbangkan letak lokasi dan kondisi sarang burung walet.

Berdasarkan data tersebut seharusnya DISPENDA kota Pontianak masih bisa mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak rumah makan ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya”**.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet selama kurun waktu dua tahun tersebut (2015-2019) ?
2. Bagaimana faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet (SBW) ?

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini memiliki (tiga) tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui berbagai faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektifitas penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan di bidang akuntansi secara khusus dan pengalaman praktik peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama di bangku perkuliahan.

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dan memberikan wawasan serta wacana kepada seluruh Satuan Kerja Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Deaerah Kab. Kubu Raya dalam mengembangkan sumber daya, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan.

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menambah wawasan bagi para pembaca tentang efektifitas dan kontribusi pajak sarang walet khususnya di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Deaerah Kab. Kubu Raya.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pajak**

Menurut Andi (2013:1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang, oleh orang atau pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

**Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusuf (2012:101) mendefinisikan, “pajak daerah merupakan pendapatan suatu daerah yang berasal dari pajak yang dibebankan oleh daerah itu sendiri.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting bagi setiap daerah karena pajak merupakan poin utama dari sumber pendapatan asli daerah dan masyarakat.

**Fungsi Pajak**

Fungsi penerimaan (*Budgetair):*sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, dan pembangunan secara baik dan rutin. contohnya; Dimasukkannya suatu pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi pengatur (Regularend):sebagai alat yang berguna mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan perekonomian, sehingga menuju kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, serta mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

**Jenis Pajak**

Jenis Pajak Provinsi Terdiri Atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok

Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

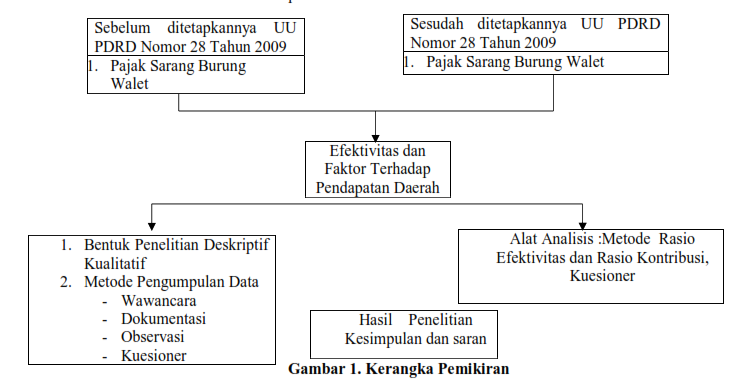
**Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor i28 Tahun i2009. pajakisarang iburung walet adalah ipajak iatas ikegiatan ipengambilan dan ipengusahaan isarang burung burung walet iadalah satwa iyang idimaksud imarga i*collocalia, i*yaitu *collocalia ifuchliap ihaga, collocalia imaxina, collocalia iesculanta, idan collocalia ilinchi.* Objek iPajak isarang burung iwalet imerupakanpengambilan atas ipengusahaan isarang iburung iwalet. Yang tidak itermasuk iobjek ipajak sarang iburung iwalet iadalah ipengambilan isarang iburung walet iyang itidak dikenakanipenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ikegiatan pengambilan sarang iburung iwalet iyang iditetapkan idengan iperaturan idaerah. Dengan subjek pajak isarang iburung iwalet iadalah iorang iatau ipribadi iatau ibadan iyang melakukan isuatu ipengambilan idan imengusahakan isarang iburung iwalet.

Dasar ipengenaan ipajak isarang iburung iwalet iadalah inilai ijual isarang iburung walet. Nilai ijual isarang iburung iwalet idengan idihitung iberdasarkan iperkalian iantara harga ipasaran iumum isarang iburung iwalet iyang itelah iberlaku idi daerah iyang bersangkutan idengan ivolume isarang iburung iwalet. iTarif ipajaki sarang iburung iwalet telah iditetapkan ipali itinggu isebesar i10%. Tarif sarang iburung walet itelah iditetapkan dengan iperaturan idaerah.

**Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Arifah (2009) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasikan, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik.



**METODE PENELITIAN**

**Bentuk Penelitian**

Sugiyono (2012) metode deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2012) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

**Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan ipada iBadan iPengelolaan iKeuangan iAset Daerah idengan menganalisis iEfektivitas idan iKontribusi iPenerimaan Pajak iSarang iBurung Walet Terhadap iPenerimaan iPajak iDaerah Kabupaten iKubu iRaya.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalahteknik wawancara, dokumentasi teknik observasi dan kuesioner/angket.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan metodeAnalisis Rasio Efektivitas dan Kontribusi, kuesioner/angket.

Rasio

Rasio

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perhitungan Hasil Analisis Efektivitas dan Kontribusi**

**Perhitungan Efektivitas**

**Tabel 2**

**Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Persenta%** | **Tingka Efektivitas** |
| 2015 | Rp.5.000.000 | Rp.19.000.000 | 380.00% | Efektif |
| 2016 | Rp.150.000.000 | Rp.24.540.000 | 16.36% | Kurang Efektif |
| 2017 | Rp.75.000.000 | Rp.57.504.000 | 76.67% | Kurang Efektif |
| 2018 | Rp.71.188.000 | Rp.80.110.000 | 112.53% | Efektif |
| 2019 | Rp.87.000.000 | Rp.87.048.000 | 100,06% | Efektif |
| Jumlah | Rp.388.188.000 | Rp.268.202.000 | 69,09 % | Kurang Efektif |

Sumber: BPKAD Kab. Kubu Raya tahun 2020 (Data diolah)

Kriteria dari Efetivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet diukur dengan Standar Kriteria pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase** | **Kriteria** |
| Diatas 99% | Efektif |
| 50-99% | Kurang Efektif |
| 0-49% | Tidak Efektif |

Tingkat efektivitas penerimaan pajak suatu daerah berbeda antara tahun sebelumya dan tahun sekarang, efektif atau tidaknya penerimaan pajak tersebut dapat dilihat dari seberapa besar penerimaan pajak daerah tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.

**Tabel 3**

**Hasil Klasifikasi Tingkat Efektivitas dan Kriteria Penerimaan**

**Pajak Sarang Burung Walet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Persentase Efektivitas (%)** | **Tingkat Efektivitas** |
| 2015 | 380.00% | Efektif |
| 2016 | 16.36% | Tidak efektif |
| 2017 | 76.67% | Kurang efektif |
| 2018 | 112.53% | Efektif |
| 2019 | 100.06% | Efektif |
| Rata-rata | 69,09 % | Kurang Efektif |

Sumber: BPKAD Kab. Kubu Raya tahun (Data diolah)

**Perhitungan Kontribusi**

**Tabel 4**

**Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Pajak Walet** | **Realisasi Pajak Daerah** | **Persentase Kontribusi %** |
| 2015 | Rp.19.000.000 | Rp.54.285.086.430,52 | 3,5% |
| 2016 | Rp.24.540.000 | Rp.67.629.094.584,60 | 3,6% |
| 2017 | Rp.57.504.000 | Rp.113.686.725.465,28 | 5,0% |
| 2018 | Rp.80.110.000 | Rp.133.593.217.033,31 | 5,9% |
| 2019 | Rp.87.048.000 | Rp.126.455.410.972,73 | 6,8% |
| Jumlah | Rp.268.202.000 | Rp.495.649.534.486 | 5,4 % |

Sumber : BPKAD Kab. Kubu Raya tahun 2020 (Data diolah)

**Tabel 5**

**Hasil Klasifikasi Tingkat Kontribusi**

**Pajak Sarang Burung Walet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Persentase Kontribusi%** | **Tingkat Kontribusi** |
| 2015 | 3,5% | Sangat Kurang |
| 2016 | 3,6% | Sangat Kurang |
| 2017 | 5,0% | Sangat Kurang |
| 2018 | 5,9% | Sangat Kurang |
| 2019 | 6,8% | Sangat Kurang |
| Rata-rata | 5,4% | Sangat Kurang |

Sumber: BPKAD Kab. Kubu Raya tahun 2020 (Data diolah)

**Persentase Naik/Turun Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet:**

Wajib pajak sarang burung walet dapat dilihat dari rekapitulasi pajak sarang burung walet kabupaten kubu raya, beserta persentase naik dan turunya jumlah wajib pajak sarang burung walet. data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6**

**Jumlah wajib pajak sarang burung walet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Wajib Pajak** | **Naik /Turun %** |
| 2015 | 19 | - |
| 2016 | 24 | 126 % |
| 2017 | 57 | 238 % |
| 2018 | 80 | 140 % |
| 2019 | 87 | 109 % |

Sumber : BPKAD Kab. Kubu Raya tahun 2020 (Data diolah)

**Faktor-faktor yang Teridentifikasi Mempengaruhi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet.**

Naik dan turunnya efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten kubu raya, Didorong oleh berbagai faktor yang baik itu dari wajib pajaknya dan dipengaruhi secara global yang mempengaruhinya. Berikut beberapa faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet: Administrasi, Harga Sarang Burung Walet, Kemauan Membayar Pajak dan Kesadaran Untuk Membayar Pajak.

**Pembahasan**

Dari hasil klasifikasi di atas, maka di ketahui tingkat kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2015-2019 berdasarkan hasil perhitungan dan analisis masih dalam kategori sangat kurang, dengan jumlah kontribusi rata-rata 5,4% pada penerimaan pajak daerah. Sangat kurangnnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet (SBW) terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya disebabkan oleh kurang efektifnya penerimaan pajak sarang burung walet itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari adanya data yang menunjukan persentase dimana tidak ada tahun yang mencapai kriteria cukup. Sehingga pada hasil akhir mendapatkan rata-rata 4.5% dengan kriteria sangat kurang.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah realisasi antara pajak sarang burung walet dengan penerimaan pajak daerah dianggap kurang, sehingga perlu adanya penambahan biaya yang harus dikeluarkan dari pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten kubu raya.

**Daftar Pustaka**

Andi, 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi.* Yogyakarta: Mardiasmo

Adelina, Rima.2012*. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*.Universitas Negeri Surabaya.

Abdul Halim, 2012. *Kajian Tentang Aktivitas Pengelolaan Retribusi di Kota Malang.* Jurnal MODERNISASI (online, vol. 8 No. 3 Oktober 2012. (<http://ejournal>.Unikama.Ac.id//index.php/JEKO/article /view/790/576). Diakses 03 Maret 2017 Pukul 10.49 WIB.

Alisman. 2017. Efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah di kabupaten Aceh Barat.

Arifah, N. N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Predana Media Group.

Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis.Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. *Yogyakarta:* Erlangga.

Bastian, Indra. 2011. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta:BPFE.

Halim, Abdul.2004*. Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim , Abdul dan Kusufi , Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Hery. 2013. *Teori Akuntansi.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasm*o.*2002*.Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah.* Yogyakarta: Andi*.*

Mardiasmo, 2009. *“Perpajakan”,* Edisi XVI-Revisi 2009. Penerbit Andi Yogyakarta.

M Hersehel Anderson, *tentang Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Manopo, Gabriel, Goraya. 2015. *Analisis efetivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah* di kabupaten minahasan.

Nordiawan, D.Putra, I. S. & Rahmawati, M. 2009. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 *tentang pajak sarang burung walet.*

Peraturan bupati Kabupaten Kubu Raya No. 44 Tahun 2018 menjelaskan tentang *penjabaran tugas pokok dan fungsi dari unsur organisasi DPPKAD* Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 *pajak daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 200, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Jakarta.

Ritongga, I. T. 2010. *Akuntansi Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana.

Siti Resmi. 2013.*nPerpajakan Teori dan Kasus.* Edisi 7 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihat. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Edisi Revisi, Rajawali Persada. Jakarta.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Shintia D. R. dkk. 2017. Analisis efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan sistem ketetapan pajak serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota bitung.

Timbul Hamonangan Simajuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Raih Asas Sukses.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang pajak retribusi daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah.*

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Salemba Empat.

Ancok, D. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. dalam: Singarimbun M dan Efendi (Eds). 1999. Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES.